

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN
PASIR ILEGAL
(Studi Kasus Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau)**

**Oleh
Alfikri Jaslindo
NIM. 160574201061**

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dengan adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal yang telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya penindakan oleh aparat penegak hukum, sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mineral dan Batu Bara menegaskan bahwasanya dalam Pasal 158 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Berangkat dari permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang beranjak dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pertambangan pasir secara ilegal sudah berjalan akan tetapi belum optimal. Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penambangan pasir secara ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam belum dilaksanakan sehingga masih maraknya terjadi kegiatan tersebut, lemahnya pengawasan dan kerjasama antar aparat penegak hukum menjadi salah satu alasan masih maraknya kegiatan tersebut, regulasi yang dibuat oleh instansi terkait belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum belum berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum baik dari segi hukumnya dari segi masyarakat serta dari faktor ekonomi dan kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, ilegal, pertambangan pasir, Kelurahan Batu Besar

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILEGAL SAND MINING (Case Study of Batu Besar Village, Nongsa Subdistrict, Batam City, Riau Islands Province)

By
Alfikri Jaslindo
NIM. 160574201061

Abstract

This research is based on the existence of illegal sand mining activities that occurred in Batu Besar Village, Nongsa District, Batam City with illegal sand mining activities that have occurred for years without any action by law enforcement officials, meanwhile in Law Number 3 of 2020 changes Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal confirms that in Article 158, which reads: Everyone who conducts mining without a permit as referred to in Article 35 is subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 100,000. 000,000.00 (one hundred billion rupiah).” Departing from the problems above, the researcher wants to know how to implement criminal law enforcement against illegal sand mining actors and find out what factors are obstacles in implementing criminal law enforcement against illegal sand mining actors in Batu Besar Village, Nongsa District, Batam City. The purpose of this study is to determine the implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining actors, and to determine the factors that become obstacles in the implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining actors. The method used in this research is juridical empirical legal research that proceeds from phenomena that occur in society. Data collection techniques used are library research and field studies which include observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the enforcement of criminal law against illegal sand mining has been running but not yet optimal. Law enforcement against perpetrators of illegal sand mining activities in Batu Besar Village, Nongsa District, Batam City has not been carried out so that these activities are still rampant, the weak supervision and cooperation between law enforcement officers is one of the reasons why these activities are still rampant, regulations made by related agencies have not been implemented. running properly. Law enforcement has not been going well because of several factors and obstacles faced by law enforcement officers, both in terms of law in terms of society as well as economic and cultural factors.

Key words: law enforcement, illegal, sand mining, batu besar village